

Tergelitik Kartel Partai Politik

Oleh Triyono Lukmantoro

Masyarakat merasa jengah, marah, dan setidaknya tergelitik, dengan hadirnya partai kartel atau dalam perbincangan sehari-hari disebut sebagai kartel partai politik. Keberadaan kartel partai-partai yang menduduki kekuasaan ini dikhawatirkan akan sangat mendominasi kebijakan negara. Namun, dipandang secara teoritis, keberadaan kartel partai politik ini merupakan hal yang sangat biasa. Sebagaimana dikemukakan Ruud Koole (2004), kartel adalah perkembangan tahap keempat dari partai politik.

Pada tahap pertama, yakni abad ke-19, muncul partai elite. Pada tahap kedua, sekitar tahun 1880-1960, hadirilah partai massa. Pada tahap ketiga, setelah tahun 1945, bergulirlah partai yang menghimpun seluruh jenis pengikut (*catch-all*). Pada tahap keempat, setelah tahun 1970, lahirilah partai kartel yang melakukan penetrasi terhadap partai politik dan negara. Jenis partai terakhir ini melakukan kerja sama (*collusion*) di antara partai-partai yang berlainan ideologi dan basis massanya. Kartel partai politik ini begitu tergantung pada sumberdaya dari negara, sehingga membatasi kemunculan partai-partai baru. Persoalannya, haruskah kartel partai politik di Indonesia ditakuti?

Jawabannya adalah tidak! Hal ini dapat disimak ketika dalam menyikapi kasus dana aspirasi daerah pemilihan, ternyata, Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—sebagai realisasi kartel partai politik—menunjukkan ketidakkompakan. Hanya Partai Golkar yang bersikeras untuk merealisasikan usulan yang dikecam banyak pihak itu. Partai-partai lain, seperti Partai Demokrat (PD), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara amat eksplisit menolak proposal itu. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum memperlihatkan sikap jelas. Namun, dilihat dari komentar sejumlah elitnya, PKB mengikuti partai lainnya.

Perpecahan sikap terhadap isu dana aspirasi tersebut menjadikan Partai Golkar seakan-akan berjuang sendirian. Bahkan, bisa pula dikatakan Partai Golkar bagai dikeroyok oleh kawan-kawan seingnya dalam Setgab. Ini berarti Setgab memang tidak pernah didirikan di atas pijakan ideologi politik yang kokoh. Setgab yang pada awalnya dikhawatirkan menghambat laju demokrasi, pada kenyataannya, hanya menunjukkan egoisme para politisi sendiri. Keberadaan Setgab memang pantas dirisaukan karena lembaga perpolitikan ini dipandang sebagai kartelisasi kekuasaan.

Sebenarnya, konsep kartel berawal dari domain pasar. Kartel dapat diartikan kumpulan perusahaan-perusahaan bisnis independen yang dirancang untuk membatasi kompetisi. Nama lain dari kartel adalah sindikat atau monopoli. Ketika kartel diterapkan dalam ranah politik, maka konsep ini merujuk pada perpaduan sejumlah partai politik yang mendominasi kekuasaan negara. Partai-partai politik yang berada di luar kartel mengalami kesulitan ketika bersaing. Kartel memberikan apa yang disebut sebagai “partisipasi yang lebih besar dengan persaingan politik yang lebih sedikit” (Antonius Made Tony Supriatma, 2009).

Instrumen pertukaran

Namun, haruskah Setgab dimaknai serupa dengan kartel politik? Tampaknya, tidak. Setgab tidak lebih menjadi kartel yang berfungsi sebagai forum tukar-menukar hadiah politik belaka. Kenyataan ini bisa disimak ketika Setgab terbentuk setelah Sri Mulyani menyatakan mundur dari posisi sebagai Menteri Keuangan. Telah menjadi rahasia umum bahwa Aburizal Bakrie—yang berkedudukan sebagai Ketua Harian Setgab—dan Sri Mulyani terlibat dalam perseteruan yang tidak gampang diselesaikan. Perseteruan itu dipicu keinginan Aburizal Bakrie untuk mendapatkan dana talangan untuk mengatasi problem lumpur panas Lapindo, persoalan penjualan saham dari kelompok usaha Bakrie, dan masalah pengemplangan pajak.

Fenomena itu menunjukkan Sri Mulyani hanya dijadikan instrumen pertukaran untuk mengeratkan jalinan relasional antara Partai Demokrat dan Partai Golkar yang terkoyak akibat skandal Bank Century. Kenyataan ini terlihat setelah pengunduran diri Sri Mulyani, Partai Golkar terlihat sengaja melemahkan diri untuk mengusut skandal pemberian dana talangan (*bail out*) senilai Rp 6,7 triliun. Apa maknanya? Politik di negeri ini selalu dimotivasi untuk melakukan pola-pola pertukaran hadiah. Dalam konteks politik ini, hadiah tidak hanya berupa cinderamata, uang, atau kado yang menyenangkan, namun melainkan jabatan dan persoalan finansial negara.

Untuk menyoroti fenomena aktual ini, pemikiran yang dikemukakan Marcel Mauss (1872-1950) pantas direnungkan. Dalam karyanya yang berjudul *The Gift* (1923), Mauss melakukan kajian terhadap keberadaan model pemberian hadiah dalam bentuk *potlatch* di Amerika, *kula* di Pasifik, dan *hau* di Selandia Baru. Hadiah adalah dasar kehidupan sosial karena di dalamnya melibatkan waktu secara khusus dan pertaruhan harga diri dari pihak-pihak yang berpartisipasi. Hadiah berharga mahal

menunjukkan prestise sosial yang tinggi. Perlombaan tukar hadiah dengan nilai yang lebih menjulang pun terjadi. Namun, dari situlah solidaritas sosial mampu diciptakan.

Dalam pandangan Mauss, terdapat tiga kewajiban yang harus dilakukan para partisipan dalam pertukaran hadiah, yakni memberi, menerima, dan membalas. Politik kita begitu persis dalam melakukan ketiga kewajiban itu. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dan Partai Demokrat yang memenangkan Pemilu 2009 memberikan hadiah, dalam wujud jabatan menteri, untuk partai-partai lain. Partai-partai yang diberi hadiah jabatan menteri itu menerima dengan senang. Tindakan berikutnya dari partai-partai lain ialah membalas dalam wujud dukungan kepada SBY-Boediono.

Pada konsep perpolitikan, pertukaran hadiah itu lazim disebut sebagai koalisi. Arti koalisi, menurut *The Merriam-Webster Dictionary* (2004), adalah “kesatuan yang bersifat temporer untuk mencapai tujuan bersama”. Koalisi tidak akan pernah awet, apalagi abadi. Tentang tujuan bersama yang dirumuskan dalam koalisi, tentu saja, tergantung pada pola-pola pertukaran hadiah. Jika pemberian jabatan menteri diterima dengan senang hati lantas dibalas dengan kesetiaan, maka koalisi pun berjalan lancar. Namun, jika pemberian jabatan menteri diterima dengan senyum gembira tapi balasan yang disodorkan ialah sikap tidak loyal, maka koalisi retak atau hancur berantakan. Koalisi yang sedemikian tambun inilah yang dilihat sebagai bentuk kartelisasi politik.

Pengingkaran janji

“Air susu dibalas dengan air tuba”. Itulah pertukaran hadiah yang dirasakan Partai Demokrat dan duet SBY-Boediono ketika menghadapi kasus Bank Century. Kemanisan sekian jabatan menteri tidak dibalas dengan dukungan yang menyatakan kebijakan *bail out* dan aliran dana tidak bermasalah, melainkan kebijakan *bail out* diduga bermasalah dan diserahkan kepada proses hukum. “Susu” dalam wujud jabatan sekian menteri untuk partai-partai koalisi (kartel) tidak dibalas dengan “susu yang lebih manis”, yakni dukungan total yang menyelamatkan harga diri SBY-Boediono.

Pada situasi semacam itu, pernyataan Mauss yang menegaskan bahwa teman hanya menjadi teman yang baik apabila pemberian hadiah dibalas dengan hadiah tidak terjadi. Apa yang bergulir ialah pemberian hadiah dibalas dengan kebohongan, yakni pengingkaran janji untuk bersetia mendukung SBY-Boediono. Ketika jabatan dibalas dengan dusta, maka respon yang disodorkan adalah pengkhianatan. Realitas lain dapat dilihat ketika di Setgab pembicaraan dana aspirasi mampu dijalankan dengan baik, namun ironisnya hanya mengesankan Partai Golkar yang begitu ngotot sendiri.

Benar pernyataan Mauss bahwa hadiah tidak pernah memiliki nilai yang bebas karena dalam hadiah terdapat martabat pihak pemberi dan pihak penerimanya. Jika jabatan menteri dibalas dengan pengungkapan skandal, maka peristiwa berikutnya ialah pengungkapan skandal dibalas dengan pengungkapan skandal. Dalam bahasa politik, realitas itu ditampilkan kasus dibalas dengan kasus lain. Itulah fenomena kekuasaan pada saat ini yang diliputi koalisi atau kartelisasi politik pertukaran hadiah yang hanya menjadikan kita tergelitik. Jadi, jangan takut dengan kartel politik yang hanya menampung para politikus yang berkarakter oportunistik.

* * *

Triyono Lukmantoro, dosen FISIP Universitas Diponegoro Semarang.

(Wawasan, 15 Juni 2010)